

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Studi Kasus pada Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)

Arisandi Nurin Syafitri¹, Suyeno², Didik Supriyanto³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Islam Malang, Jl MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
Email: arisandinurinsyafitri@gmail.com*

ABSTRAK

Efektivitas pelaksanaan kebijakan lokal memainkan peran utama dalam menentukan seberapa baik program perlindungan sosial mendukung pembangunan berkelanjutan. Studi ini meneliti bagaimana Program Harapan Keluarga (PKH) diimplementasikan di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam upaya membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi ini menyelidiki peran rumah tangga penerima, pejabat desa, dan fasilitator PKH dalam implementasi program menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Menurut temuan, implementasi PKH sangat berhasil dalam meningkatkan kepatuhan perawatan kesehatan, keterlibatan pendidikan, dan beban keuangan pada rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, kesulitan dalam validasi data, kurangnya sumber daya untuk fasilitator, dan distribusi bantuan yang tidak memadai telah membuat implementasinya kurang ideal. Koordinasi antar pelaksana, perhatian terhadap kebutuhan penerima manfaat, dan pemantauan berkala adalah contoh elemen pendukung. Keterbatasan administratif dan kurangnya sumber daya manusia merupakan hambatan. Pada akhirnya, Program Harapan Keluarga (PKH) membantu mencapai SDGs secara lokal di samping memberikan bantuan sosial. Untuk memaksimalkan implementasi program, perubahan harus dilakukan pada sistem koordinasi, kapasitas sumber daya, dan validasi data.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Keluarga Harapan; SDGs; Kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan multifaset yang terkait dengan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan prospek pekerjaan, di samping pendapatan yang rendah. Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa 9,36 persen penduduk Indonesia, atau lebih dari 25,9 juta orang, hidup dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan di wilayah tersebut adalah 10,35 persen di Provinsi Jawa Timur dan 8–9 persen di Kabupaten Pasuruan, dengan tingkat kemiskinan absolut yang cukup tinggi.

Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gresik, yang memiliki karakteristik regional serupa. Hal ini menunjukkan adanya variasi regional dalam pencapaian pembangunan sosial dan menekankan pentingnya strategi lokal yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang lebih tinggi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang menuntut pelaksanaan program yang sebaik mungkin.

Salah satu tujuan utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah mengurangi kemiskinan secara global. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Indonesia bertujuan untuk menurunkan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat dengan penekanan pada perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, peraturan pelaksanaan lokal memiliki peran penting dalam efektivitas program tersebut.

Karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, merupakan tempat yang relevan untuk meneliti implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi PKH mendukung dan menghambat pencapaian SDGs di tingkat desa.

Tujuan Penelitian

1. Meneliti strategi implementasi Program Harapan Keluarga (PKH) untuk membantu Desa Karangjati mencapai SDGs.
2. Menentukan unsur-unsur yang memfasilitasi dan menghambat implementasi PKH.

Manfaat Penelitian

1. Keunggulan Teoritis

Mendukung kemajuan penelitian administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan SDGs dan implementasi kebijakan sosial.

2. Keunggulan Praktis

Memberikan saran kepada administrasi desa dan organisasi terkait untuk meningkatkan efisiensi implementasi PKH.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Kemampuan suatu program untuk mencapai tujuan yang dinyatakan bergantung pada fase implementasi kebijakan publik dalam siklus kebijakan. George C. Edwards III (1980) mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: struktur birokrasi, disposisi (sikap pelaksana), komunikasi, dan sumber daya. Sumber daya mencakup ketersediaan staf, pendanaan, dan fasilitas pendukung, sedangkan komunikasi menjaga kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan kepada pelaksana dan tujuan program. Sementara struktur birokrasi berkaitan dengan metode dan prosedur koordinasi untuk implementasi kebijakan, disposisi menggambarkan dedikasi dan sikap pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Harapan Keluarga (PKH) adalah jenis strategi perlindungan sosial yang memberikan dukungan sosial bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu dan rentan. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023) menyatakan bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dengan memperluas akses terhadap layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Secara teoritis, pengembangan sumber daya manusia merupakan dasar dari program bantuan sosial bersyarat, yang berinvestasi dalam kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Transfer tunai bersyarat, menurut Fiszbein dan Schady (2009), tidak hanya menawarkan dukungan finansial langsung tetapi juga mendorong perubahan perilaku jangka panjang, seperti kehadiran yang lebih baik di sekolah dan kepatuhan terhadap perawatan medis.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Keluarga penerima manfaat, pejabat lokal, dan fasilitator PKH termasuk di antara informan. Model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang menggabungkan kondensasi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan, digunakan dalam proses analisis data.

Fokus Penelitian

Penekanan penelitian ini adalah menetapkan batasan yang jelas dan cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan di lapangan. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian dapat berubah seiring waktu sebagai respons terhadap kondisi lapangan.

Fokus penelitian ini meliputi:

1. Menerapkan Kebijakan Program Harapan Keluarga (PKH) untuk Membantu Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Model George C. Edwards III digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Model ini terdiri dari:

a. Interaksi

melihat bagaimana masyarakat diberi informasi tentang program PKH dan bagaimana pemerintah desa dan fasilitator PKH bekerja sama.

b. Materi

memeriksa sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program, termasuk infrastruktur dan fasilitas serta sumber daya manusia (fasilitator PKH).

c. Sikap (Disposisi Pelaksana)

mengevaluasi komitmen, sikap, dan tugas pelaksana program dalam melaksanakan PKH.

d. Struktur Birokrasi

menyelidiki distribusi tenaga kerja, proses implementasi, dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan PKH.

2. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan PKH

Fokus ini mengklarifikasi elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH, seperti:

- a. Elemen Pendukung
- b. Elemen Penghambat

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer digunakan untuk mengumpulkan data di lingkungan alami.

Wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi berkelanjutan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini hingga tercapai saturasi.

1. Observasi

Observasi lapangan langsung terhadap pelaksanaan Program Harapan Keluarga di Desa Karangjati digunakan untuk mengumpulkan data.

Temuan dari observasi tersebut terdiri dari:

- a. Tindakan fasilitator PKH dan pejabat desa dalam melaksanakan program
- b. Komunikasi antara masyarakat penerima manfaat dan pelaksana program
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima PKH
- d. Memenuhi tanggung jawab PKH (kesehatan dan pendidikan)

2. Percakapan

Informasi komprehensif tentang implementasi PKH dikumpulkan melalui wawancara mendalam.

Wawancara dilakukan dengan:

- a. Fasilitator PKH
- b. Pejabat desa
- c. Keluarga penerima manfaat (KPM)
- d. Informan tambahan sebagai pendukung.

3. Catatan

Melalui berbagai materi dan arsip yang relevan, dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data penelitian.

Di antara dokumen yang dikumpulkan adalah:

- a. Informasi penerima manfaat PKH
- b. Dokumen implementasi program PKH
- c. Gambar kegiatan fasilitasi PKH
- d. Laporan atau arsip kegiatan PKH
- e. Dokumen tingkat desa yang berkaitan dengan SDGs

Teknik Analisis Data

Model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Dari awal hingga akhir penelitian, model ini memandang analisis data sebagai aktivitas yang berkelanjutan dan saling terkait.

Fase-fase analisis data terdiri dari:

1. Kondensasi Data. Prosedur untuk memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan memodifikasi data yang dikumpulkan di lapangan.
2. Penyajian Data. Untuk mempermudah pemahaman temuan penelitian, data disajikan dalam format naratif deskriptif.
3. Membuat dan Mengkonfirmasi Kesimpulan. Berdasarkan pola, koneksi, dan hasil yang ditemukan, kesimpulan dibuat dan kemudian diterapkan secara konsisten sepanjang penelitian.

Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. William Wiersma (dalam Sugiyono, 2013) mendefinisikan triangulasi sebagai strategi untuk mengkonfirmasi keaslian data menggunakan beberapa sumber, pendekatan, dan periode waktu.

Di antara metode triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai informan, termasuk masyarakat, pejabat desa, dan fasilitator PKH.
2. Triangulasi Metode. Untuk mendapatkan data yang konsisten, hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumen.
3. Triangulasi Waktu. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi data pada berbagai waktu untuk memastikan informasi tersebut akurat dan stabil.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendukung Pencapaian SDGs

- a. Interaksi

Di Desa Karangjati, komunikasi sangat penting untuk implementasi kebijakan PKH. Menurut penelitian, telah terjadi hubungan yang konstan antara fasilitator PKH, pejabat desa, dan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui inisiatif penyuluhan, pertemuan yang sering, dan dukungan lapangan langsung. Fasilitator PKH memfasilitasi penyebaran pengetahuan tentang hak dan kewajiban penerima manfaat. Pemahaman dasar tentang program PKH telah berhasil dipupuk melalui komunikasi ini, terutama terkait komitmen dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, masih ada hambatan dalam berbagi pengetahuan, dan tidak semua orang di masyarakat menerimanya secara merata, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman KPM.

Teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif perlu disebarluaskan secara merata, konsisten, dan jelas. Karena adanya kesenjangan informasi yang terus-menerus di tingkat masyarakat, komunikasi dalam konteks penelitian ini belum mencapai potensi penuhnya.

b. Sumber Daya

Infrastruktur, dukungan administratif, dan sumber daya manusia merupakan sumber daya untuk implementasi PKH. Menurut penelitian, jumlah fasilitator PKH masih terbatas dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat (KPM) yang harus mereka bantu, yang berdampak pada tingkat dukungan lapangan. Implementasi program semakin terhambat oleh keterbatasan sistem administrasi dan kurangnya fasilitas pendukung. Namun, fasilitator PKH berupaya menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk melaksanakan pekerjaan mereka seefektif mungkin.

Menurut Edwards III, persyaratan penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah ketersediaan sumber daya yang memadai. Kurangnya sumber daya menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Karangjati masih perlu diperkuat, terutama terkait dengan kapasitas pelaksanaan dan fasilitas pendukung.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap atau perilaku para pelaksana menunjukkan dedikasi dan akuntabilitas mereka dalam melaksanakan program. Fasilitator PKH dan pejabat desa secara umum menunjukkan sikap responsif dan komitmen untuk mendukung pelaksanaan program, menurut temuan penelitian. Fasilitator PKH secara aktif menawarkan dukungan, mendidik keluarga penerima manfaat (KPM), dan memastikan bahwa persyaratan program terpenuhi. Sementara itu, para pemimpin desa mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya di tingkat desa untuk memberikan dukungan.

Namun, tingkat pemenuhan KPM terus berfluktuasi, menunjukkan bahwa disposisi ditentukan oleh pelaksana dan penerima manfaat. Menurut tesis Edwards III, komponen kunci dari implementasi yang sukses adalah disposisi pelaksana. Meskipun disposisi pelaksana dianggap positif dalam penelitian ini, kesadaran publik yang lebih luas masih diperlukan.

d. Struktur Birokrasi

Mekanisme koordinasi, pembagian kerja, dan prosedur pelaksanaan program semuanya merupakan bagian dari struktur birokrasi yang digunakan dalam Program Harapan Keluarga (PKH). Struktur implementasi PKH telah berfungsi sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara fasilitator PKH dan administrasi desa, menurut temuan penelitian. Melalui pertemuan dan kontak informal, fasilitator dan pemimpin desa secara teratur berkoordinasi. Tantangan administratif, seperti validasi data penerima manfaat yang buruk dan keterlambatan penyaluran bantuan, masih ada dalam praktiknya.

Edwards III menekankan bahwa koordinasi yang kuat dan prosedur yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk struktur birokrasi yang sukses. Meskipun kerangka kerja birokrasi telah dibangun, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai efisiensi yang lebih besar, komponen administratif dan koordinasi masih perlu ditingkatkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKH

a. Unsur-Unsur Pendukung

Kerja sama yang baik antara fasilitator PKH dan pejabat desa, dedikasi pelaksana program, dan kepatuhan keluarga penerima manfaat terhadap persyaratan program merupakan aspek pendukung bagi pelaksanaan Program Harapan Keluarga (PKH) di Desa Karangjati (KPM). Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan program juga diperlukan pemantauan dan peninjauan yang berkelanjutan.

Untuk membantu pelaksanaan PKH, menjamin keberhasilan program, dan memberi manfaat bagi masyarakat, para pelaksana harus bekerja sama.

b. Faktor Penghambat

Implementasi PKH masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah validasi data penerima manfaat, kekurangan asisten, dan keterlambatan distribusi bantuan. Selain itu, beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) masih belum sepenuhnya memahami atau mematuhi persyaratan program.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi PKH masih suboptimal dan aspek teknis serta administratif perlu ditingkatkan.

Kesimpulan

Implementasi Program Harapan Keluarga (PKH) di Desa Karangjati telah sangat sukses, menurut temuan penelitian, dan telah membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta mengurangi beban keuangan dalam pelaksanaannya. Namun, kesulitan komunikasi yang terus-menerus, keterbatasan sumber daya, dan masalah administrasi telah menghambat optimalisasi implementasi program secara penuh. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan implementasi program, diperlukan modifikasi.

Saran

1. Untuk memastikan program lebih terfokus, Pemerintah Desa Karangjati disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan fasilitator PKH dan memperluas keterlibatan mereka dalam proses validasi data penerima manfaat.
2. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan penerima manfaat terhadap program, fasilitator PKH disarankan untuk mengintensifkan penyuluhan dan pendampingan masyarakat.
3. Untuk bertanggung jawab dalam memperoleh bantuan sosial, masyarakat (KPM) diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap tugas-tugas program.
4. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas program dalam membantu pencapaian SDGs, para peneliti disarankan untuk menyelidiki implementasi PKH menggunakan pendekatan yang lebih luas atau komparatif di berbagai wilayah..

Daftar Pustaka

Buku :

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2013. Understanding Public Policy. New Jersey: Pearson Education.
- Halim, Abdul. 2022. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kriyantono, R. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M.. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2020. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2004. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press.
- Parsons, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- rikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, Maya. 2023. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukardi, Imam. 2019. Komunikasi Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Malang: UB Press.
- Wiersma, W. (1986). Research Methods in Education: An Introduction. Boston: Allyn and Bacon.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi Revisi). Yogyakarta: CAPS.

Jurnal dan skripsi :

- Andhika, Lukman Rakhmadevan. 2017. "Kolaborasi dalam Implementasi Kebijakan Publik". Jurnal Administrasi Publik.
- Ayomi, Paulus Karmel, Huklubuk, Adam Videlo, dan Warwuru, Marselino. 2025. "Pemanfaatan Sustainable Development Goals Terhadap Pembangunan di Ohoi Ohoiren Kabupaten Maluku Tenggara". Skripsi/Penelitian.
- Dharmawan, Yusuf. 2021. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia". Jurnal Kebijakan Publik.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fauzi, M. Asif Nur dan Afroh, Roisatul. 2022. "Program Keluarga Harapan Sebagai Alternatif Perubahan Sikap dan Perilaku Keluarga Miskin". Jurnal Kebijakan Sosial.
- Ferawati. 2018. "Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia". Jurnal Pembangunan Berkelanjutan.
- Hastuti, dkk. 2020. "Evaluasi Targeting Program Keluarga Harapan". Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Irhamisyah. 2019. "Sustainable Development Goals dan Peran Negara". Jurnal Hubungan Internasional.
- Kurniawan, Indra. 2024. "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur". Skripsi.
- Loewe, Markus dan Rippin, Nicole. 2015. "The Sustainable Development Goals of the Post-2015 Agenda: Comments on the OWG and SDSN Proposals". DIE Briefing Paper.
- Mazmannia, Daniel A. 1997. "Implementation and Public Policy". Public Administration Review.
- Panuluh, Sekar dan Fitri, Meila Riskia. 2016. "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals di Indonesia". Kajian.
- Purwanti, Eka Henny. 2023. "Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba". Skripsi.
- Sukoco, Dwi dan Pujiyono. 2021. "Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan". Jurnal Pekerjaan Sosial.
- Usman, Wartoyo, Haida, Nur, dan Wahyuningsih, Nining. 2024. "Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal/Penelitian.

Website

- DRI IPB. (2019, 19 September). Guna percepatan graduasi mandiri, KPM Sempur diserbu dosen IPB. Direktorat Riset dan Inovasi IPB. <https://dri.ipb.ac.id/guna-percepatan-graduasi-mandiri-kmp--sempur-diserbu-dosen-ipb/>
- Repository UGM. (2021). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Pulau Jawa: Analisis evaluasi dampak Propensity Score Matching (PSM) data IFLS 5. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/174333>

Undang-undang :

- Kementerian Sosial RI. 2022. Data dan Informasi Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Bappenas. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals . Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.